THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi dan Standar Inter-Parliamentary Union

Christina Clarissa Intania
Peneliti Bidang Hukum
untuk The Indonesian Forum Ke-113

THE INDONESIAN Forum

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

AGENDA

- Partisipasi publik dalam proses legislasi menurut UU P3, Tatib DPR, preseden Partisipasi Bermakna
- Tentang Inter-Parliamentary Union dan Indicators for Democratic Parliaments
- Untuk masa mendatang...

THE INDONESIAN Forum

UU P3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dalam:

- **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019**
- **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**

Pasal 96 ayat (1) sampai dengan (5)

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara **lisan dan/atau tertulis** dalam **setiap tahapan** Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara **daring dan/atau luring.**
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang **perseorangan** atau **kelompok** orang yang **terdampak langsung** dan/atau **mempunyai kepentingan** atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk **memudahkan** masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap **Naskah Akademik** dan/atau **Rancangan Peraturan Perundang-undangan,** dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
5. Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan **menginformasikan kepada masyarakat** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Bentuk-bentuk Konsultasi Publik/Pemberian Aspirasi

Berdasarkan Pasal 96 ayat (6) UU P3, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, dan praktik di lapangan

- pertemuan dengan pimpinan komisi/gabungan komisi
- Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
- seminar
- pertemuan dengan Baleg atau Badan Anggaran
- pertemuan dengan pimpinan komisi/gabungan komisi
- lokakarya
- kunjungan kerja
- pertemuan dengan pansus
- diskusi
- FGD
- media sosial

THE INDONESIAN Forum

Dalam kaitannya dengan partisipasi bermakna..



Hak untuk didengar

✓ Segala bentuk **penerimaan aspirasi publik**



Hak untuk dipertimbangkan

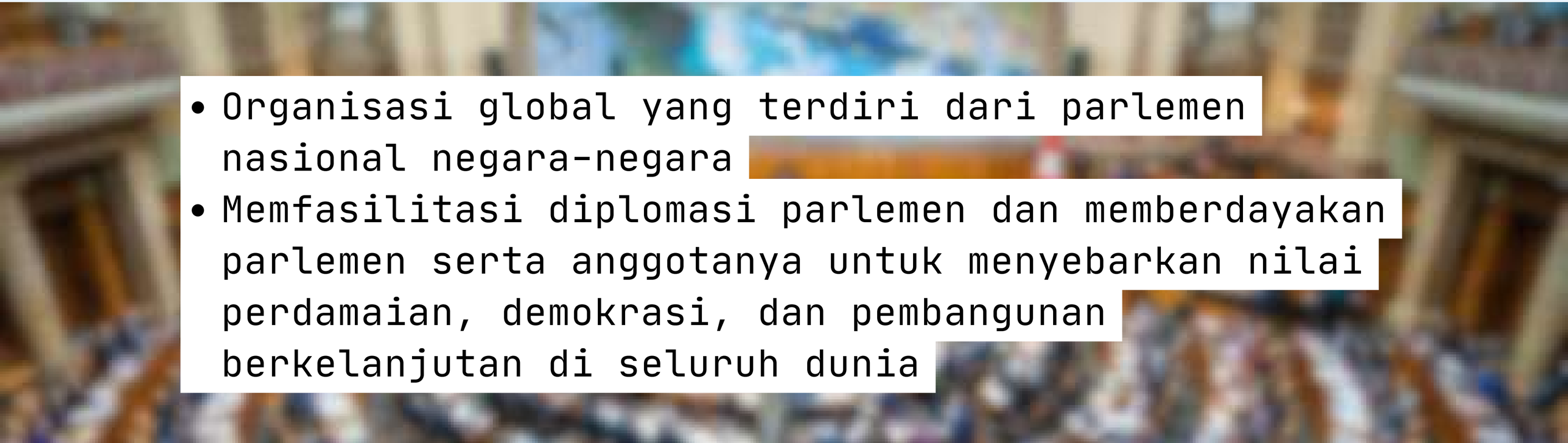


Hak untuk dijelaskan

<u>Pasal 96 ayat (7) UU P3</u>
Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **menjadi bahan pertimbangan** dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

<u>Pasal 96 ayat (8) UU P3</u>
Pembentuk Peraturan Perundang-undangan **dapat menjelaskan** kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



- Organisasi global yang terdiri dari parlemen nasional negara-negara
- Memfasilitasi diplomasi parlemen dan memberdayakan parlemen serta anggotanya untuk menyebarkan nilai perdamaian, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Indicators for Democratic Parliaments

- Alat untuk **mendukung pembelajaran dan pegembangan** parlemen.
- Memberikan kerangka untuk parlemen bisa **mengevaluasi diri dan mengembangkan diri.**
- Terdiri dari **25 indikator** yang dikelompokkan jadi 7 target
- Mendukung **SDG:** effective, accountable, transparent, responsive, inclusive, participatory and representative
- **Indonesia** telah menjadi salah satu negara yang mengikuti uji coba awal tahap 3 tahun **2022.**

THE INDONESIAN Forum

Indikator terkait partisipasi publik

Indicator 6.1: Parliamentary environment for public participation

Dimension 6.1.1: Legal framework for public participation
Dimension 6.1.2: Institutional capacity for public participation
Dimension 6.1.3: Public education about the work of parliament

Indicator 6.2: Public participation in parliamentary processes

Dimension 6.2.1: Participation in law making
Dimension 6.2.2: Participation in oversight
Dimension 6.2.3: Participation in the budget cycle
Dimension 6.2.4: Managing public input and providing feedback

Indikator terkait inklusivitas

Indicator 5.1: Inclusive law-making, oversight and budgeting

Dimension 5.1.1: Human rights

Dimension 5.1.2 : Impact assessments

Dimension 5.1.3 : Gender mainstreaming

Dimension 5.1.4 : Gender responsive budgeting

Dimension 5.1.5 : Youth inclusion

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Rekomendasi

- DPR, DPD, dan Pemerintah perlu **lebih *update*** dalam **membagikan perkembangan penyusunan** RUU di laman resmi yang tersedia.
- pemanfaatan **NA** yang lebih optimal untuk **menampung sudut pandang berbagai macam pihak terdampak dan memiliki kepentingan** secara obyektif dan berdasar penelitian.
- Perlunya **penentuan pihak-pihak terlibat** dalam perancangan UU berdasarkan analisis dampak yang mumpuni.
- **Peningkatan metode** penerimaan aspirasi publik.
- **Pertemuan** yang dilakukan **lebih dari satu kali** dengan pihak selain pemerintah untuk meningkatkan jaminan dipertimbangkannya masukan masyarakat sipil.

THE INDONESIAN Forum

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

TERIMA KASIH

THE INDONESIAN Forum